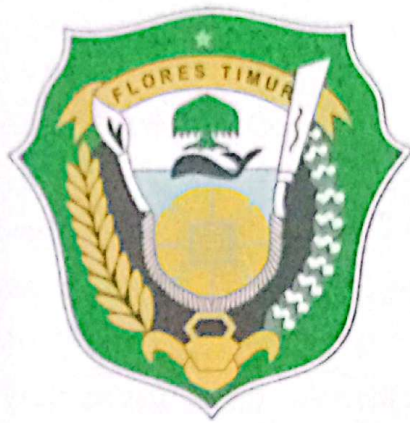


**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
TAHUN 2024**

# **LAKIP**



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA  
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK**



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkah dan karunianya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap keseluruhan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber dan kebijaksanaan. Selain itu, penyusunan LAKIP ini berdasarkan evaluasi dan analisa capaian kinerja kegiatan dengan sasaran dan mengacu pada Rencana Strategis 2023 – 2026 dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahun 2024 merupakan tahun pertama dalam periode Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tujuan dari penyusunan LAKIP ini adalah melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan program kerja yang diselenggarakan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta dalam rangka menyampaikan hasil evaluasi dan analisis realisasi kinerja kegiatan dari pelaksanaan kebijakan dan program.

Walaupun telah diupayakan seoptimal mungkin melalui pendekatan koordinasi, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 tidak terlepas dari kendala - kendala teknis yang dihadapi oleh masing-masing bidang terkait.

LAKIP ini dapat menjadi panduan bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur untuk meningkatkan kinerja organisasi sesuai dengan tujuan, sasaran, program, dan kebijakan yang telah ditetapkan. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan bahan masukan dan partisipasi aktif dalam penyusunan laporan ini.

Larantuka, Januari 2025

Kepala Dinas  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Flores Timur,



**Anselmus Yohanes Maryanto, S.Sos**

Pembina Utama Muda

NIP. 19670420 199703 1 001

## DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1. Latar Belakang.....	4
1.2 Profil dan Sejarah Singkat.....	4
1.3 Sistematika.....	6
1.4 Kedudukan dan Susunan Organisasi.....	7
1.6 Dasar Hukum.....	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	19
2.1 Pernyataan Visi.....	19
2.2 Indikator Kinerja Utama.....	19
2.3 Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	24
3.1 Capaian Kinerja .....	24
3.2 Analisis Capaian.....	26
3.3 Permasalahan dan Kelemahan.....	27
3.4 Realisasi Anggaran.....	29
3.4.1 Target dan Realisasi Belanja.....	29
3.4.2 Pengukuran Kinerja Keuangan.....	29
BAB IV PENUTUP.....	56
4.1 Kesimpulan.....	56



## DAFTAR TABEL/GAMBAR

	Hal.
Tabel 1.....	2
Tabel 2.2.1.....	20
Tabel 2.3.1.....	23
Tabel 2.3.2.....	24
Tabel 3.1.....	26
Tabel 3.2.1.....	27
Tabel 3.1.3.....	27
Tabel 3.4.2.1.....	30
Tabel 3.4.2.2.....	49
Gambar 1.1.....	16
Gambar 1.2.....	16
Gambar 1.3.....	17

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pada pasal 56 Ayat (1) BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) memiliki tugas melaksanakan Pengendalian Penduduk dan menyelenggarakan Keluarga Berencana. Kemudian untuk melaksanakan tugas tersebut, pada pasal 56 Ayat (2) BKKBN mempunyai fungsi antara lain : a). perumusan kebijakan nasional; b). penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK); c). pelaksanaan advokasi dan koordinasi; d). penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi; e). penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi; f). pembinaan, pembimbingan dan fasilitas di Bidang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana.

Laporan Kinerja tahun 2024 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur berupaya meningkatkan kinerjanya dalam rangka mencapai tujuan strategis. Untuk memastikan tujuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat tercapai, maka telah ditetapkan sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah merumuskan sasaran program dan menetapkan indikator sasaran program sebagai upaya



mendukung pencapaian tujuan strategis. Sasaran program beserta indikatornya ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja selama tahun 2024. Laporan Kinerja juga dimanfaatkan sebagai alat kendali dan alat pengukuran kinerja secara kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas.

Hasil penilaian kinerja tahun 2024 menunjukkan bahwa dari Lima (5) indikator kinerja tidak seluruhnya tercapai. Ikhtisar capaian tersebut tampak sebagai berikut:

Tabel: 1 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024

NO	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi (%)
1	Cakupan PUS Peserta KB Aktif	54,75	49,12
2	Angka Kelahiran Total (TFR)	3,0	2,2
3	Indeks Pembangunan Gender	93,16	91,97
4	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	19	78
5	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak	23	48

Uraian capaian program tersebut adalah :

1. Cakupan PUS Peserta KB Aktif, Pencapaian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk IKU 1 adalah sebesar 49,12 % dari target 54,75% ini diakibatkan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk ber-KB.
2. Angka Kelahiran Total (TFR) sebesar 2,2 ini menunjukkan bahwa setiap wanita produktif sesuai kelompok umur bisa melahirkan anak dua selama masa produktif.

3. Indeks Pembangunan Gender sebesar 91,97 ini menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia Laki- Laki dan Perempuan sudah baik tidak ada ketimpangan
4. Jumlah Kasus Terhadap Perempuan sebesar 78 kasus ini menunjukkan bahwa masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan
5. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak sebesar 48 kasus ini menunjukkan bahwa masih tingginya juga kasus kekerasan terhadap anak.

Dari 5 indikator kinerja utama, yang targetnya terpenuhi ada satu indikator, sedangkan yang lainnya belum terpenuhi sesuai target. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target indikator kinerja tersebut.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Amanat penyusunan Laporan Kinerja telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan bagi setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan strategis berupa Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Secara teknis, tata cara penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### **1.2 Profil dan Sejarah Singkat**

Pembangunan Kependudukan dan KB merupakan salah satu program sosial dasar yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan kualitas penduduk dan sekaligus berkontribusi terhadap pengendalian pertumbuhan penduduk. Program ini merupakan investasi jangka panjang yang keberhasilannya akan menjadi pondasi bagi tumbuhnya keluarga yang berkualitas yang pada akhirnya memberi peluang bagi terciptanya sumber daya manusia dan generasi masa depan yang tangguh dan mandiri.

Program KB di Kabupaten Flores Timur pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015 dan pada saat itu nomenklatur BKKBN

adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Namun di tahun 2009 diterbitkan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, sehingga berimplikasi terhadap perubahan kelembagaan, visi dan misi BKKBN. Undang-undang tersebut mengamanatkan perubahan kelembagaan BKKBN yang semula Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Jika dilihat situasi dan kondisi masalah kependudukan di Kabupaten Flores Timur memerlukan perhatian dan penanganan yang seksama, lebih sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Salah satu upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memperkuat program KKBPK hingga ke pelosok-pelosok daerah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).



### 1.3 Sistematika

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 mengacu pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah sebagai berikut :

#### BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Kondisi Geografis, Data Demografi, Kondisi Ekonomi Daerah, Kondisi Pemerintahan, Jumlah Pegawai Negeri Sipil. Bab I juga berisi Permasalahan Utama (*strategis issue*) serta Sistematika penyajian LKIP Kabupaten Flores Timur.

#### BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini berisi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi Pembangunan, Arah Kebijakan, Rencana Strategis dan Program Kegiatan, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja (PK) Kabupaten Flores Timur 2023.

#### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan informasi terkait pengukuran kinerja organisasi dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2023, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

#### BAB IV PENUTUP

Berisi ringkasan dan kesimpulan terkait pencapaian kinerja dan pemanfaatannya dalam rangka *feed back* dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur.

#### **1.4 Kedudukan dan Susunan Organisasi**

Kedudukan dan Susunan Organisasi Berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor: 78 Tahun 2016, adalah sebagai berikut:

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari :

(1) Susunan organisasi Dinas, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan; dan
  3. Fungsional Perencana.
- c. Bidang Pengendalian Penduduk:
  1. Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana
- d. Bidang Keluarga Berencana:
  1. Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan:
  1. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
- f. Bidang Perlindungan Anak:
  1. Fungsional Analisis Kebijakan

#### **Tugas dan Fungsi**

##### **Kepala Dinas**

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.



(2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan administrasi dinas;
- d. pembinaan, pengoordinasian dan pengendalian urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Sekretariat:**

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(1) Sekretariat, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan, mengarahkan dan mengoordinasikan urusan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, surat menyurat, penyusunan program kegiatan dan pelaporan serta perencanaan dan keuangan.

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
- b. penyusunan program dan anggaran;
- c. pengelolaan keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara/daerah; dan
- d. pengelolaan urusan kepegawaian.

### **Bidang Pengendalian Penduduk**

Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Pengendalian Penduduk. Bidang pengendalian penduduk menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja pengendalian penduduk;
- b. perumusan kebijakan teknis pengendalian penduduk;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian penduduk;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengendalian penduduk;  
dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Bidang Keluarga Berencana**

Bidang Keluarga Berencana dalam mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Keluarga Berencana. Bidang Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja keluarga berencana;
- b. perumusan kebijakan teknis keluarga berencana;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan keluarga berencana;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan keluarga berencana; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Bidang Pemberdayaan Perempuan**

Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Perempuan. Bidang Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja pemberdayaan perempuan;
- b. perumusan kebijakan teknis pemberdayaan perempuan;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan perempuan;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan perempuan;  
dan



- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **Bidang Perlindungan Anak**

Bidang Perlindungan Anak dalam mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Perlindungan Anak. Bidang Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja perlindungan anak;
- b. perumusan kebijakan teknis perlindungan anak;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan perlindungan anak;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan perlindungan anak; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, administrasi kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik negara/daerah.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam menyelenggarakan fungsi:

- a penatausahaan administrasi perkantoran;
- b pengelolaan dokumen kepegawaian;
- c pengelolaan perlengkapan perkantoran;
- d pengelolaan dan penataan barang milik negara/daerah; dan
- e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **Keuangan**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan Dinas. Sub Bagian Keuangan dalam, menyelenggarakan fungsi:

- a perencanaan pengelolaan keuangan;
- b pelaksanaan pengelolaan keuangan;

- c penatausahaan keuangan;
- d verifikasi dan pembukuan laporan keuangan; dan
- e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Fungsional Perencana**

Fungsional Perencana mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan pelaksanaan Program, Data dan Evaluasi kegiatan di lingkungan Dinas. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi, menyelenggarakan fungsi:

- a penyiapan penyusunan program, data dan evaluasi;
- b perencanaan program, data dan evaluasi;
- c pelaporan pelaksanaan program, data dan evaluasi; dan
- d pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Tugas Dan Fungsi Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana pada Bidang Pengendalian Penduduk**

Membantu Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dalam menyelenggarakan urusan advokasi dan kerjasama, dan melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja advokasi dan kerjasama;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis advokasi dan kerjasama;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan advokasi dan kerjasama;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan advokasi dan kerjasama;

dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

- e. penyusunan rencana kerja data dan informasi;
- f. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis data dan informasi;
- g. pelaksanaan program dan kegiatan data dan informasi;
- h. pengendalian, evaluasi dan pelaporan data dan informasi; dan



- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- j. penyusunan rencana kerja pengendalian pergerakan penduduk;
- k. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian pergerakan penduduk;
- l. pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian pergerakan penduduk;
- m. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengendalian pergerakan penduduk; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Tugas Dan Fungsi Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana pada Bidang Keluarga Berencana**

Membantu Kepala Bidang Keluarga Berencana dalam menyelenggarakan urusan Bidang Keluarga Berencana sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- f. penyusunan rencana kerja jaminan pelayanan keluarga berencana;
- g. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis jaminan pelayanan keluarga berencana;
- h. pelaksanaan program dan kegiatan jaminan pelayanan keluarga berencana;

- i. pengendalian, evaluasi dan pelaporan jaminan pelayanan keluarga berencana; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- k. penyusunan rencana kerja pembinaan dan peningkatan kesetaraan keluarga berencana;
- l. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan peningkatan kesertaan keluarga berencana;
- m. pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan dan peningkatan kesertaan keluarga berencana;
- n. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembinaan dan peningkatan kesertaan keluarga berencana; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **Tugas Dan Fungsi Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Pada Bidang Pemberdayaan Perempuan**

Membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam menyelenggarakan urusan bina ekonomi perempuan kepala keluarga dan tugas sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja bina ekonomi perempuan kepala keluarga;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bina bina ekonomi perempuan kepala keluarga;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan bina ekonomi perempuan kepala keluarga;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan bina ekonomi perempuan kepala keluarga; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- f. Penyusunan rencana kerja bina sosial, politik dan hukum;



- g. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bina sosial, politik dan hukum;
- h. pelaksanaan program dan kegiatan bina sosial, politik dan hukum;
- i. pengendalian, evaluasi dan pelaporan bina sosial, politik dan hukum; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- k. penyusunan rencana kerja bina kualitas keluarga;
- l. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bina kualitas keluarga;
- m. pelaksanaan program dan kegiatan bina kualitas keluarga;
- n. pengendalian, evaluasi dan pelaporan bina kualitas keluarga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **Tugas Dan Fungsi Fungsional Analisis Kebijakan pada Bidang Perlindungan Anak**

**Membantu** Kepala Bidang Perlindungan Anak dalam menyelenggarakan urusan pada bidang perlindungan anak sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja pengasuhan alternatif dan pendidikan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengasuhan alternatif dan pendidikan;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan pengasuhan alternatif dan pendidikan;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengasuhan alternatif dan pendidikan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- f. penyusunan rencana kerja hak sipil, informasi dan partisipasi;
- g. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis hak sipil, informasi dan partisipasi;
- h. pelaksanaan program dan kegiatan hak sipil, informasi dan partisipasi;

- i. pengendalian, evaluasi dan pelaporan hak sipil, informasi dan partisipasi; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- k. penyusunan rencana kerja kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- l. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- m. pelaksanaan program dan kegiatan kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- n. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kesehatan dasar dan kesejahteraan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Struktur Organisasi**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur memiliki struktur organisasi dapat dilihat pada Gambar 1.1, sebagai berikut:



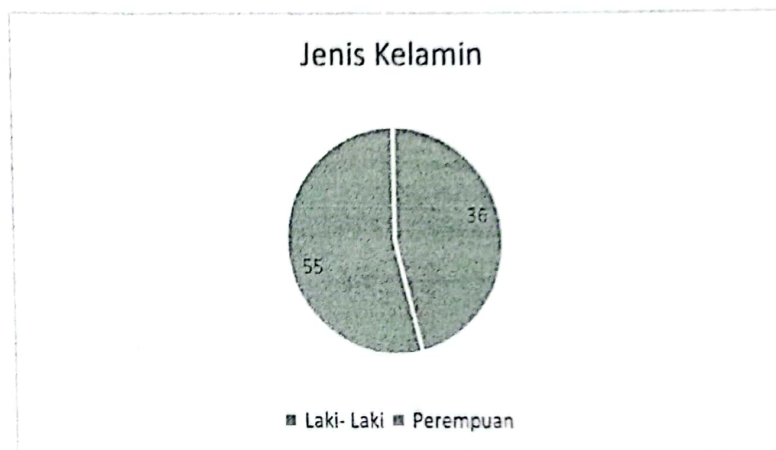
### Sumber Daya

Hingga akhir tahun 2024, jumlah sumber daya manusia yang aktif di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebanyak 136 orang (termasuk PNS dan Non PNS PKB/PLKB).

Bila dirinci, ASN yang penempatan di Dinas sebanyak 22 orang dan PPPK sebanyak 4 orang, non ASN sebanyak 7 orang, sedangkan untuk dilapangan PKB/PLKB PNS sebanyak 16 orang, PPPK 49 sebanyak orang dan non ASN sebanyak 38 orang.

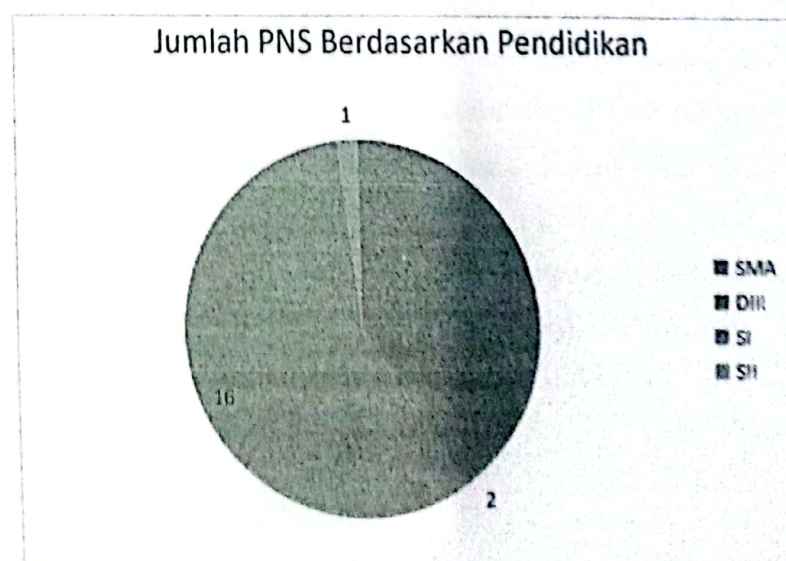
**Gambar 1.1**

**Jumlah ASN/P3K Di Dinas dan Dilapangan berdasarkan Jenis Kelamin**

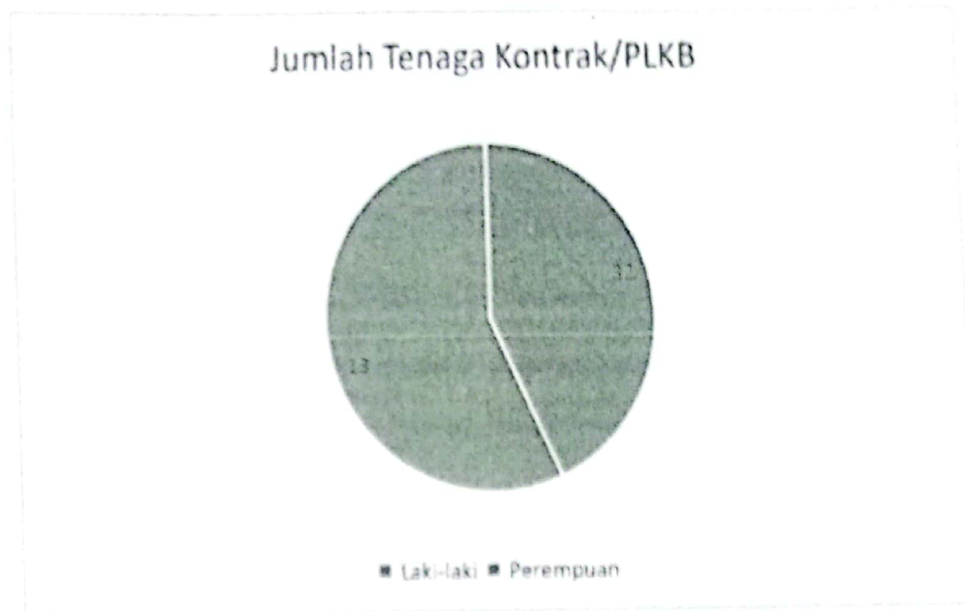


**Gambar 1.2**

**Jumlah ASN Di Dinas dan Lapangan Berdasarkan Pendidikan**



**Gambar 1.3**  
**Jumlah Tenaga Kontrak Di Dinas dan Lapangan Berdasarkan Jenis Kelamin**



### 1.6 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 adalah:

1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;
5. Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).



6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Visi Pembangunan Daerah**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur mendukung visi daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 yakni ” **Flores Timur Yang Maju, Sejahtera, Bermartabat dan Berdaya Saing**”, dengan misi pembangunan daerah yakni:

1. Mewujudkan daya saing
2. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
3. Mewujudkan manusia dan masyarakat bermoral dan berbudaya
4. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik

#### **2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan mempedomani Indikator Kinerja Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2005- 2025, serta rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023- 2026.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dimaksud ditetapkan dengan memilih indikator- indikator kinerja yang berfokus pada tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur. Penjelasan tentang Indikator Kinerja Utama tersebut adalah sebagai berikut:



Tabel 2.2.1  
Penjelasan Indikator Kinerja Utama DP2KBP3A Kabupaten Flores Timur

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG-JAWAB	SUMBER DATA	DEFENISI OPERASIONAL
						FORMULA / RUMUS PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kinerja Bangsa Kencana	Cakupan peserta KB aktif	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Laporan pelaksanaan kegiatan	Jumlah Peserta KB Aktif Jumlah Pasangan Usia Subur X 100%
		Cakupan Akseptor Baru	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Laporan pelaksanaan kegiatan	Jumlah Peserta Keluarga Berencana Jumlah Sasaran x100%
		Angka Kelahiran Total (TFR)	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Laporan pelaksanaan kegiatan	$TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{b_i}{p_i} \times k$
2	Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat tentang program KB					

N O	SASARAN STRATEGI S	INDIKATOR KINERJA	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	DEFENISI OPERASIONAL FORMULA / RUMUS PERHITUNGAN	
						7	
1	2	3	4	5	6	ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur $bi = \frac{\text{Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur } i \text{ pada tahun tertentu}}{\text{Jumlah penduduk perempuan kelompok umur } i \text{ pada pertengahan tahun}}$ yang sama $i = \text{kelompok umur } (i=1 \text{ untuk kelompok umur } 15-19, 1-2 \text{ untuk kelompok umur } 20-24, \dots)$	
3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Perempuan dan Perlindungan Anak	Laporan pelaksanaan kegiatan	$\frac{\text{Indeks Pembangunan Perempuan}}{\text{Indeks Pembangunan Laki-Laki}} \times 100 \%$	
4	Meningkatnya Keterdayaan Perempuan	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Perempuan dan Perlindungan Anak	Laporan pelaksanaan kegiatan		
5	Meningkatnya Keterdayaan Perempuan	Jumlah kasus kekerasan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Perempuan dan Perlindungan Anak	Laporan pelaksanaan kegiatan		



N O	SASARAN STRATEGI S	INDIKATO R KINERJA	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWA B	SUMBER DATA	DEFENISI OPERASIONAL FORMULA / RUMUS PERHITUNGAN	
						7	
1	2 Anak	3 terhadap Anak	4 Perempuan dan Perlindungan Anak	5 Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6 kegiatan		

### 2.3 Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Perjanjian Kinerja pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilakukan 2 Kali yaitu Perjanjian Kinerja dan Perubahan. Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Penjabat Bupati Flores Timur pada bulan Januari 2024, kemudian dilakukan revisi pada bulan November 2024. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya revisi adalah

1. Penyusun kembali perencanaan jangka menengah daerah Kabupaten Flores Timur yang berdampak dari Masa Jabatan Kepala Daerah berkarir pada Tahun 2022 sehingga di buatlah dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.



2. Penyusun kembali Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 menggantikan Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022. dengan melakukan penyesuaian Kembali Indikator Kinerja.
3. Penyesuaian target kembali dikarenakan adanya perubahan-perubahan pada penganggaran.

Perubahan Perjanjian Kinerja tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengatur: Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- a. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran); dan
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 2.3.1

## Sasaran Strategis Dinas P2KBP3A

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun Dasar	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-			
			2021	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas Pengendalian Penduduk dan Layanan Keluarga Berencana	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka TFR (%)	3,2	3,1	3,0	2,8	2,6
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender (Point)	3,2	3,1	3	2,8	2,6
	Menurunnya Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (Kasus)	24	20	19	18	17
	Menurunnya Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak (Kasus)	28	25	23	21	19



## **BAB. III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan tujuan Pemerintah Kabupaten Flores Timur, sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan yang ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Flores Timur merupakan wujud pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Flores Timur atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan berdasarkan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Laporan ini, memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPD 2023 - 2026. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Dalam RPD terdapat 4 Tujuan, 16 Sasaran, dengan 42 Indikator Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, menggunakan rumus

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Atau :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Realisasi}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2023 dijabarkan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu capaian kinerja tujuan dan capaian kinerja sasaran strategis.

Ada 4 (empat) tujuan yang hendak dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yaitu:

1. Terwujudnya daya saing daerah
2. Terwujudnya pembangunan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan
3. Terwujudnya manusia dan masyarakat yang berkualitas
4. Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik

Kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Revisi Perjanjian Kinerja (PK) Penjabat Bupati Tahun 2024. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Penjabat Bupati merupakan kinerja tahun ke-1 pada periode RPD Kabupaten Flores Timur 2023-2026.

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :



Tabel 3.1  
Skala Pengukuran

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	Lebih dari 100 %	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75 % s.d 100 %	Baik (B)
3	55 % s.d 75 %	Cukup (C)
4	Kurang dari 55 %	Kurang (K)

Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 80,15 dengan nilai Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Kategori **Baik** yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis.

### 3.2 Analisis Capaian

Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 diukur berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja. Pengukuran capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara target rencana kinerja dengan realisasinya.

Pencapaian sasaran strategis sesuai indikator dan target kinerja pada tahun 2024, yang disajikan secara berurutan mulai dari penetapan target, realisasi, capaian kinerja tahunan serta perbandingan capaian kumulatif sampai tahun 2024 terhadap target maupun capaian Renstra DP2KBP3A Kabupaten Flores Timur. Hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran strategis meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2.1  
Pencapaian Sasaran Strategis Dinas P2KBP3A Tahun 2024

Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun Dasar	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
		2021	2022	2023	2024	2024	2024
Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka TFR (%)	3,2	Belum ada dalam IKU	2,58	3,0	2,2	73,33 %
Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender (Point)	3,2	Belum ada dalam IKU	92,08	93,16	91,97	98,72 %
Menurunnya Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (Kasus)	24	25 Kasus	84 Kasus	20 Kasus	78	78 Kasus
Menurunnya Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak (Kasus)	28	3 Kasus	84 Kasus	25 Kasus	48 Kasus	48 Kasus

### 3.3 Permasalahan dan Kelemahan

Permasalahan dan kelemahan yang ditemukan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan capaian target kinerja yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

#### 1. Angka TFR (%)

- Permasalahan yang dihadapi terkait Angka Kelahiran Total (TFR) bahwa masih ditemukan wanita produktif yang melahirkan anak lebih dari 3 anak dengan jarak yang dekat.
- Rencana Strategis peningkatan layanan reproduksi dan pengendalian kelahiran dengan meningkatkan kesertaan KB.
- Rencana Aksi yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan diatas adalah:
  - Meningkatkan kemampuan SDM terkhususnya para penyuluh KB dilapangan.



- Meningkatkan konseling dan pembinaan terhadap Pasangan Usia Subur.

## 2. Indeks Pembangunan Gender (Poin)

- Permasalahan yang dihadapi terkait Indeks Pembangunan Gender adalah bahwa masih ditemukannya ketidaksetaraan gender, diskriminasi sebagai contoh kekerasan terhadap perempuan baik fisik, psikis, ekonomi dan lain- lain.
- Rencana Strategis yaitu perencanaan penganggaran yang responsif gender.
- Rencana Aksi yang akan dilakukan adalah
  - Membuat Perda terkait perlindungan perempuan korban kekerasan.
  - Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar lembaga yang menangani kekerasan perempuan.

## 3. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (Kasus)

- Permasalahan yang ada bahwa masih tingginya kekerasan terhadap perempuan dan masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait perlindungan perempuan.
- Rencana strategis yaitu menetapkan peraturan yang relevan
- Rencana Aksi yang akan dilakukan adalah:
  - Menciptakan produk hukum yaitu Perda Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan.
  - Meningkatkan penganggaran terhadap program dan kegiatan yang menangani perlindungan perempuan.

## 4. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak (Kasus)

- Permasalahan yang ada bahwa masih tingginya kekerasan terhadap anak dan masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait perlindungan terhadap anak.
- Rencana strategis yaitu menerapkan dan menegakkan hukum, meningkatkan kesadaran masyarakat, meningkatkan pendapatan dan ekonomi

➤ Rencana Aksi yang akan dilakukan adalah:

- Memperluas akses layanan perlindungan anak
- Meningkatkan penganggaran terhadap program dan kegiatan yang menangani perlindungan anak
- Memperkuat peran orang tua dengan lebih inten melakukan sosialisasi dan konseling.

### **3.4 Realisasi Anggaran**

#### **3.4.1 Target dan Realisasi Belanja**

Anggaran yang dialokasikan untuk Program/ Kegiatan Dinas P2KBP3A Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 seluruhnya sebelum perubahan sebesar Rp. 10.711.225.181,- dan setelah mengalami perubahan sebesar Rp. 11.149.328.782,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.437.113.597 atau sebesar 84 %. Anggaran tersebut terdiri dari belanja operasional dan belanja modal.

#### **3.4.2 Pengukuran Kinerja Keuangan**

Pada tahun 2024 Dinas P2KBP3A Kabupaten Flores Timur melaksanakan 2 (dua) Urusan, 9 (Sembilan) Program 25 (dua puluh lima) Kegiatan dan 60 (enam puluh) Kegiatan dalam mewujudkan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Flores Timur. Adapaun hasil pengukuran terhadap kinerja keuangan dari program dan kegiatan strategis tersebut dapat disajikan pada tabel berikut:



Tabel 3.4.2.1  
Realisasi Anggaran Program/ Kegiatan  
untuk Mendukung Pencapaian Sasaran Strategi  
Dinas P2KBP3A  
Kabupaten Flores Timur

URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/S UB KEGIATAN (Satuan)	TAR GET	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SESUDAH PERUBAHAN	Sumber Dana	Realisasi	%
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			7.885.402.457	8.201.592.509		6.597.035.337	80,44
URUSAN PEMERINTAH N BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			7.555.407.269	7.871.447.881		6.314.123.909	80,22
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			362.234.770	362.234.770		357.483.567	98,69

Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyediaan pengolahan data kependudukan		362.234.770	362.234.770		357.483.567	98,69
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1	59.999.920	59.999.920	DAK (Non Fisik- BOKKB- BOKB)	59.819.000	99,70
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	2	176.400.000	176.400.000	DAK (Non Fisik- BOKKB- BOKB)	176.400.000	100,00
Pengelolaan dan Pelaporan Data pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayan KB	12	107.835.000	107.835.000	DAK (Non Fisik- BOKKB- BOKB)	103.264.717	95,76
Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	5	2.999.850	2.999.850	DAU	2.999.850	100,00



Penyusunan Profil Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1	15.000.000	15.000.000	DAU (Pajak Kendaraan Bermotor)	15.000.000	100,00
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan PUS Peserta KB Aktif (%)		5.290.972.559	5.306.013.559			
	Cakupan Akseptor Baru (%)					3.754.690.550	70,76
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		1.497.473.000	1.512.514.000		1.485.393.230	98,21
Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2	51.600.000	51.530.000	DAK (Non Fisik-BOKKB-BOKB)	51.530.000	100,00
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	10	781.423.000	781.564.000	DAK (Non Fisik-BOKKB-BOKB)	781.564.000	100,00

Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	10	328.700.000	328.700.000	DAK (Non Fisik-BOKKB-BOKB)	328.700.000	100,00
Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1	101.750.000	101.750.000	DAK (Non Fisik-BOKKB-BOKB)	97.595.650	95,92
Advokasi Program Bangga Kencana oleh pokja advokasi kepada Stakholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga	25	234.000.000	248.970.000	DAK (Non Fisik-BOKKB-BOKB)	226.003.580	90,78



	Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholder dan Mitra Kerja						
<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>Jumlah Laporan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>		<b>750.000.000</b>	<b>750.000.000</b>		<b>750.000.000</b>	<b>100,00</b>
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	250	750.000.000	750.000.000	DAK (Non Fisik-BOKKB-BOKB)	750.000.000	100,00
<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota</b>	<b>Jumlah Jenis Alat Kontrasepsi yang didistribusikan dan Sarana Penunjang Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota</b>		<b>2.653.449.859</b>	<b>2.653.449.859</b>		<b>1.129.328.120</b>	<b>42,56</b>
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana Penunjang Pelayanan KB	2	12.500.000	12.500.000	DAU (Pajak Kendaraan Bermotor)	12.500.000	100,00

Jaringan dan Jejaringnya	ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya						
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	250	2.105.700.239	2.105.700.239	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB (Pajak Kendaraan Bermotor)	788.588.500	37,45
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	3	18.450.000	18.450.000	DAK (Non Fisik-BOKKB-BOKB)	18.440.000	99,95
Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	20	496.800.000	496.800.000	DAU (Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan)	289.800.000	58,33
Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	450	19.999.620	19.999.620	DAU (Pajak Kendaraan Bermotor)	19.999.620	100,00



Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		390.049.700	390.049.700		389.969.200	99,98
Penguata Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan pembinaan Kesertaan Ber-KB	6 organisasi	29.999.700	29.999.700	DAU (Pajak Kendaraan Bermotor)	29.919.200	99,73
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (dokumen)	1	4.800.000	4.800.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB (Pajak Kendaraan Bermotor)	4.800.000	100,00

pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berencana	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	35	355.250.000	355.250.000	DAK (Non Fisik-BOKKB-BOKB)	355.250.000	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase remaja Perempuan Umur 15-19 tahun menjadi ibu atau sedang hamil anak pertama (%)		1.902.199.940	2.203.199.552		2.201.949.792	99,94
	Persentase Balita yang mengikuti KOBAR PAUD (%)						#DIV/0!
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-		327.199.940	628.199.552		626.949.792	99,80



	R) Bina Keluarga Landia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)						
Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	8	7.600.000	7.600.000	DAK (Non Fisik-BOKKB-BOKB)	7.600.000	100,00
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang Tersedia	52	319.599.940	620.599.552	DAU DAK (Non Fisik-BOKKB-BOKB)	619.349.792	99,80

Pelaksanaan dan Penigkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			1.575.000.000	1.575.000.000		1.575.000.000	100,00
Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting ( Termasuk Remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahir an, Baduta/Balit a)	10	750.000.000	750.000.000	DAK (Non Fisik- BOKKB- BOKB)	750.000.000	100,00
Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting ( Termasuk Remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahir an, Baduta/Balit a) yang Mendapat Pendampinga	10	825.000.000	825.000.000	DAK (Non Fisik- BOKKB- BOKB)	825.000.000	100,00



	n						
URUSAN PEMERINTAHAN N BIDANG PEMBERDAYAAN N PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN N PEREMPUAN			329.995.188	330.144.628		282.911.428	85,69
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN N PEREMPUAN	Persentase Perempuan yang berpartisipasi di sektor publik(%)	46,0 0%	74.999.076	74.999.086		70.599.086	94,13
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan dan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG (perangkat daerah)	6 Perangkat Daerah	19.999.642	19.999.652		18.659.652	93,30
Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan	6 Perangkat Daerah	19.999.642	19.999.652	DAU (Pajak Kendaraan Bermotor)	18.659.652	93,30

<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kab/Kota</b>	Pembangunan Responsif Gender (PPRG) bagi Organisasi Pemerintah Kewenangan Kab/Kota (perangkat daerah)						
	<b>Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Sosial dan Ekonomi dan Organisasi Masyarakat Kewenangan Kab/Kota (dokumen)</b>		29.999.742	29.999.742		28.559.742	95,20
<b>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi</b>	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kab/Kota (organisasi)	10 Organisasi	29.999.742	29.999.742	DAU (Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan)	28.559.742	95,20

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/kota			24.999.692	24.999.692		23.379.692	93,52
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	30	24.999.692	24.999.692	DAU (Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan)	23.379.692	93,52
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang terselesaikan (%)		70.000.000	70.000.000		29.210.000	41,73
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota (lembaga)		70.000.000	70.000.000		29.210.000	41,73
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	24	70.000.000	70.000.000	DAU (Pajak Kendaraan Bermotor)	29.210.000	41,73



Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas						
<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>Peringkat Pusat pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang berhasil dicapai</b>		114.996.812	115.146.712		113.469.112	98,54
<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			34.999.830	34.999.830		34.999.830	100,00
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	34.999.830	34.999.830	DAU (Ditentukan Penggunaanya Bidang Pendidikan)	34.999.830	100,00
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam</b>	<b>Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Penguatan (Lembaga)</b>	<b>4 Lembaga</b>	<b>54.999.392</b>	<b>55.149.292</b>		<b>54.536.692</b>	<b>98,89</b>

Daerah Kabupaten/Kota							
Advokasi Kebijakan dan pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan (lembaga)	2  Lemb aga	29.999.632	29.999.632	DAU (Ditentu kan Penggun aanya Bidang Pendidik an)	29.509.632	98,37
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/K ota	10	24.999.760	25.149.660	DAU (Ditentu kan Penggun aanya Bidang Pendidik an)	25.027.060	99,51
Penyediaan Layanan Bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Data Gender dan Anak, untuk Dimanfaatkan dalam Pengambilan Kebijakan Anak Kabupaten/K ota (laporan)		24.997.590	24.997.590		23.932.590	95,74

Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota (layanan)	1 Layanan	24.997.590	24.997.590	DAU	23.932.590	95,74
<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA DAN GENDER</b>	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	19.999.900	19.999.900		19.704.300	98,52
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	19.999.900	19.999.900		19.704.300	98,52
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	19.999.900	19.999.900	DAU (Pajak Kendaraan Bermotor)	19.704.300	98,52
<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak (%)		49.999.400	49.998.930		49.928.930	99,86



	Persentase Desa/Kelura han Layak Anak (%)						#DIV/0!
Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kot a			19.999.940	19.999.760		19.934.760	99,67
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	1	19.999.940	19.999.760	DAU (Pajak Kendara an Bermoto r)	19.934.760	99,67
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kot a			29.999.460	29.999.170		29.994.170	99,96
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangr. Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/K ota	30	19.999.690	19.999.690	DAU	19.994.690	99,97

Pengutan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/K ota	1	9.999.770	9.999.480	DAU (Pajak Kendara an Bermoto r)	9.999.480	100,00
---	--	---	-----------	-----------	---	-----------	--------

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2024 telah dialokasikan belanja sebesar Rp. 7.885.402.457,- dan setelah perubahan menjadi Rp. 8.201.592.509,- yang digunakan untuk pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Flores Timur, dengan realisasi sebesar Rp.6.597.035.337 atau sebesar 80,44 %.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program/ kegiatan utama Dinas P2KBP3A Kabupaten Flores Timur, maka Dinas P2KBP3A Kabupaten Flores Timur juga melaksanakan program/ kegiatan rutin yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.4.2.2  
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Rutin DP2KBP3A  
Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGE T	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SESUDAH PERUBAHAN	Sumbe r Dana	Realisasi	%
DINAS PENGENDALI AN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK			2.825.822.724	2.947.736.273		2.840.078.260	96,35
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						2.840.078.260	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN KOTA	Tingkat Pelayanan Administras i Perkantoran (%)	100%	2.825.822.724	2.947.736.273		2.840.078.260	100,50
	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	77%					



	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	53%					
	Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100%					
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dok)</b>		50.752.920	60.082.540		59.602.800	99,20
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	2	15.749.600	26.719.600	DAU (Pendapatan dari Pengembalian Dana Transfer Umum)	26.615.300	99,61
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dok)	2	9.999.700	9.999.700	DAU (Pajak Kendaraan Bermotor)	9.860.000	98,60
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	4	9.999.860	9.999.860	DAU (Pajak Kendaraan Bermotor)	9.750.000	97,50

Kinerja SKPD	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD(laporan)						
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	15.003.760	13.363.380	DAU (Pajak Kendar aan Bermot or)	13.357.500	89,03
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (dok)		2.361.615.394	2.454.552.353		2.366.863.393	100,22
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (org/bulan)	28/14	2.273.115.394	2.366.052.353	DAU	2.302.730.094	101,30
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Honor Pengelola Keuangan)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	73.500.000	73.500.000	DAU (Pajak Kendar aan Bermot or)	49.200.000	66,91

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Lembur Keuangan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2	15.000.000	15.000.000	DAU (Pajak Kendaraan Bermotor)	14.933.299	99,56
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)		9.999.700	9.999.700		9.176.700	91,77
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Lembur Barang)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dok	9.999.700	9.999.700	DAU (Pajak Kendaraan Bermotor)	9.176.700	91,77
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)		9.998.000	9.998.000		9.915.000	99,17
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Lembur Kepegawaian)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	9.998.000	9.998.000	DAU (Pajak Kendaraan Bermotor)	9.915.000	99,17



Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)		123.947.465	136.019.655		134.173.020	98,64
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Paket)	2	1.990.995	1.990.995	DAU (Pajak Kendar aan Bermot or)	1.987.500	99,82
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja Ketrak dan Titan Komputer)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan (paket)	3	4.950.750	4.950.750	DAU (Pajak Kendar aan Bermot or)	4.950.750	100,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Belanja Bahan dan Peralatan Kebersihan)	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan (Paket)	1	7.000.000	7.001.270	DAU (Pajak Kendar aan Bermot or)	6.751.500	96,45
Penyediaan Bahan Logistik Kantor (ATK)	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3	29.999.020	31.175.020	DAU (Pajak Kendar aan Bermot or)	31.106.000	99,78
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan (paket)	2	20.006.700	20.206.620	DAU (Pajak Kendar aan Bermot or)	20.206.500	100,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu (Makan Minum Tamu)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	12	10.000.000	11.500.000	DAU (Pajak Kendar aan	10.200.000	88,70

Rapat	Tamu (laporan)				Bermot or)		
Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	50.000.000	59.195.000	DAU (Pajak Kendar aan Bermot or)	58.970.770	99,62
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)		25.095.000	37.365.000		35.700.000	95,54
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (unit)	2	17.895.000	30.165.000	DAU (Pajak Kendar aan Bermot or)	28.600.000	94,81
Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Belanja Gorden)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	7.200.000	7.200.000	DAU (Pajak Kendar aan Bermot or)	7.100.000	98,61
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)		148.179.620	133.984.400		127.661.000	86,15
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	1.499.620	1.499.400	DAU (Pajak Kendar aan Bermot	1.498.400	99,92

	(laporan)				or)		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(l aporan)	12	36.280.000	31.285.000	DAU (Pajak Kendar aan Bermot or)	24.962.600	68,81
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	7	110.400.000	101.200.000	DAU (Retrib usi Jasa Umum)	101.200.000	91,67
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjanga n Urusan Pemerintah Daerah(%)		96.234.625	105.734.625		96.986.347	100,78
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (servis,pajak, dan suku cadang, BBM)	Jumlah Kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinya	5	79.995.000	86.495.000	DAU (Pajak Kendar aan Bermot or)	77.911.722	97,40
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor dan	1	10.059.625	10.059.625	DAU (Pajak Kendar	10.059.625	100,00



dan Bangunan lainnya	bangunan lainnya yang Dipelihara/d irehabilitasi (unit)				aan Bermot or)		
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Ganti Pintu Belakang)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/R ehabilitasi (unit)	1	2.130.000	2.130.000	DAU (Pajak Kendar aan Bermot or)	2.130.000	100,00
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Pemeliharaan AC dan Laptop)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/R ehabilitasi (unit)	2	4.050.000	7.050.000	DAU (Pajak Kendar aan Bermot or)	6.885.000	97,66

Tabel teraebut menunjukkan bahwa pada tahun 2024 telah dialokasikan belanja sebesar Rp. **2.825.822.724** dan setelah mengalami perubahan menjadi Rp. **2.947.736.273,-** yang digunakan untuk Program/Kegiatan rutin Dinas P2KBP3A, dengan realisasi sebesar Rp. **2.840.070.260** atau 96 %.


## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP ) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Flores telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran – sasaran strategis yang telah ditetapkan. Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 4 sasaran yang mencakup 4 indikator sasaran, bahwa indikator sasaran 1 dengan total capaian 98,72 % indikator sasaran 2 dengan total capaian 98,72%, indikator sasaran 3 dengan total capaian 78 Kasus, dan indikator sasaran 4 dengan total capaian 48 kasus. Rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai **80,15%** dengan kategori **Baik**. Jadi capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Flores pada Tahun 2024 **Baik**.

Larantuka, Januari 2025

Kepala Dinas  
{ Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Flores Timur, 



**Anselmus Yohanes Maryanto, S.Sos**

Pembina Utama Muda

NIP. 19670420 199703 1 001

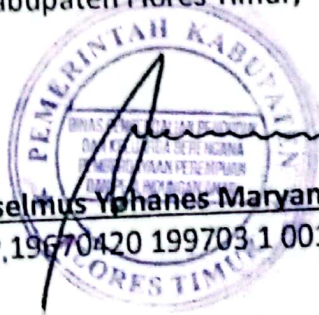
**RENCANA KERJA TAHUNAN  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)**

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur  
Tahun : 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-
			2025
Meningkatnya kualitas Pengendalian Penduduk dan Layanan Keluarga Berencana	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka TFR (%)	2,8
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender (Point)	2,8
	Menurunnya Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (Kasus)	18
	Menurunnya Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak (Kasus)	21

Larantuka, Januari 2025

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Flores Timur,

  
**Anselmus Yphanes Maryanto, S.Sos**  
NIP.19670420 199703 1 001